

*disampaikan pada Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019-2020*



Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan tahun 2019 - 2021

Rizqi Yuwanita Habibah, S.T., M.T.

Direktorat Pembangunan Daerah
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN / Bappenas

Jakarta, 30 September 2021

Kerangka Pembahasan

Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan
tahun 2019 - 2021



ARAH KEBIJAKAN

1

Arah Kebijakan Percepatan
Pelaksanaan SPM dalam RPJMN
2020 – 2024 dan RKP 2022

HASIL EVALUASI

2

Hasil Evaluasi Penerapan
SPM bidang Kesehatan tahun
2019 - 2021

Tema, Pengarusutamaan, dan Prioritas RPJMN 2020-2024

Tema RPJMN 2020 – 2024:

Indonesia
Berpenghasilan
Menengah-Tinggi
yang Sejahtera,
Adil, dan
Berkesinambungan

Pengarusutamaan RPJMN 2020 – 2024:



Kesetaraan
Gender



Tata Kelola
(Governance)



Pembangunan
Transformasi Digital



Pembangunan
Berkelanjutan



Modal Sosial
Budaya

Prioritas RPJMN 2020 – 2024:



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas



2. Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan



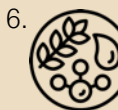
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing



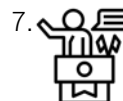
4. Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan



5. Memperkuat Infrastruktur
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6. Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim



7. Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

SPM dalam Indikator dan Target Kegiatan Prioritas RPJMN 2020 - 2024



Kegiatan Prioritas:

- 1 Pengembangan Sektor Unggulan
- 2 Pengembangan Kawasan Strategis
- 3 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan
- 4 Pengembangan Kawasan Strategis
- 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Indikator dan Arah Kebijakan KP #5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Kebijakan Strategi	Indikator	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
Persentase pencapaian SPM di daerah		N/A*	100%
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	N/A	542 daerah
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	N/A	542 daerah
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	N/A	4.875 aparatur

*) Data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia, adapun data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%

Target Persentase Capaian Penerapan SPM

Indikator	Baseline 2019	Target
Persentase capaian SPM bidang Pendidikan	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Pekerjaan Umum	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Perumahan Rakyat	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Sosial	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Trantibumlinmas	N/A	100%

Jenis Layanan dan Indikator Target Capaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis layanan provinsi	
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
Jenis layanan kabupaten/kota	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4.	Pelayanan kesehatan balita
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

INDIKATOR MATRIKS RPJMN 2020-2024	INDIKASI TARGET	
	2021	2024
Angka Kematian Ibu (per 100ribu KH)	217	183
Angka kematian bayi per 1000 KH	19,5	16
Prevalensi stunting balita (%)	21,1	14 %
Prevalensi wasting balita (%)	7,8	7 %
Prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern (mCPR) %	62,2	63,4 %
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,3	7,4 %
ASFR 15-19 tahun (%)	24	18 %
Insidensi TB (per 100ribu penduduk)	252	190
Insidensi HIV	0,21	0,18
Eliminasi malaria (Kab/kota)	345	405
Persentase Merokok usia 10-18 tahun (%)	9,0	8,7 %
Prevalensi Obesitas usia > 18 tahun (%)	21,8	21,8 %

Penerima Layanan Dasar

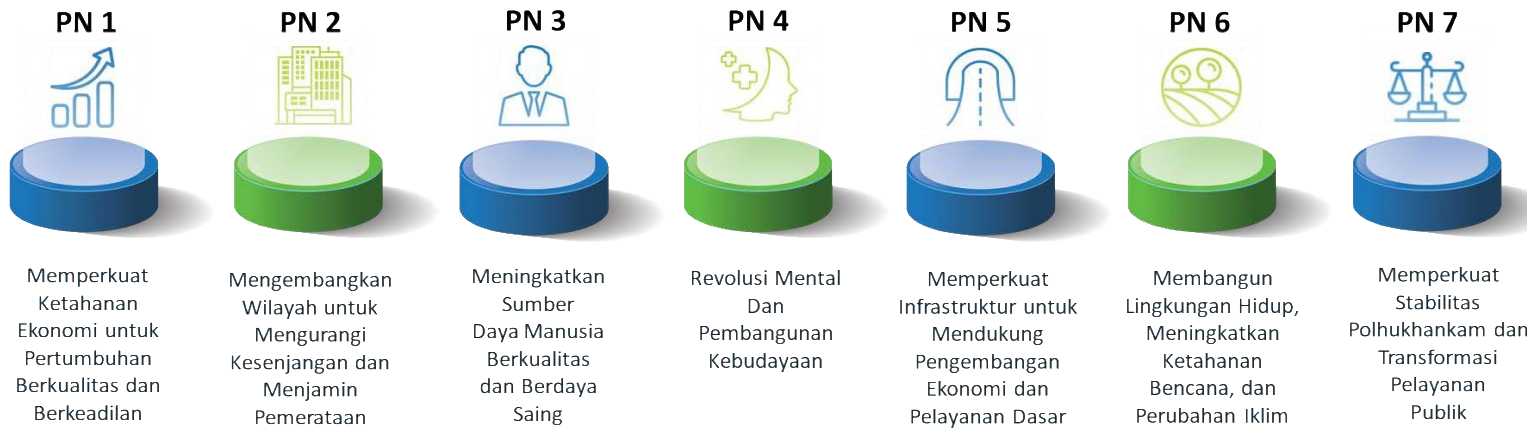
- Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- Ibu hamil
- Ibu bersalin
- Bayi baru lahir
- Balita
- Usia pendidikan dasar
- Usia produktif
- Usia lanjut ;
- Penderita hipertensi
- Penderita diabetes melitus
- Orang dengan gangguan jiwa berat
- Orang terduga tuberkulosis
- Orang dengan risiko terinfeksi HIV

Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 (Perpres 85/2021)

Tema RKP 2022

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

PRIORITAS NASIONAL



Sasaran Pembangunan^{*)}



Disampaikan pada Raker Banggar DPR RI, 25 Agustus 2021
 *)Keterangan: Target dalam nota keuangan 2022. Hasil kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah adalah 5,2-5,8%

Indikator lainnya:

 Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) **102-104**
 Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) **102-105**



Transformasi Ekonomi Indonesia

6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia (Jangka Menengah-Panjang)

1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi digital
5. Integrasi Ekonomi Domestik
6. Pemindahan IKN

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam PN 2 Tahun 2022

Pengembangan Wilayah Tahun 2022

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19,
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah,
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

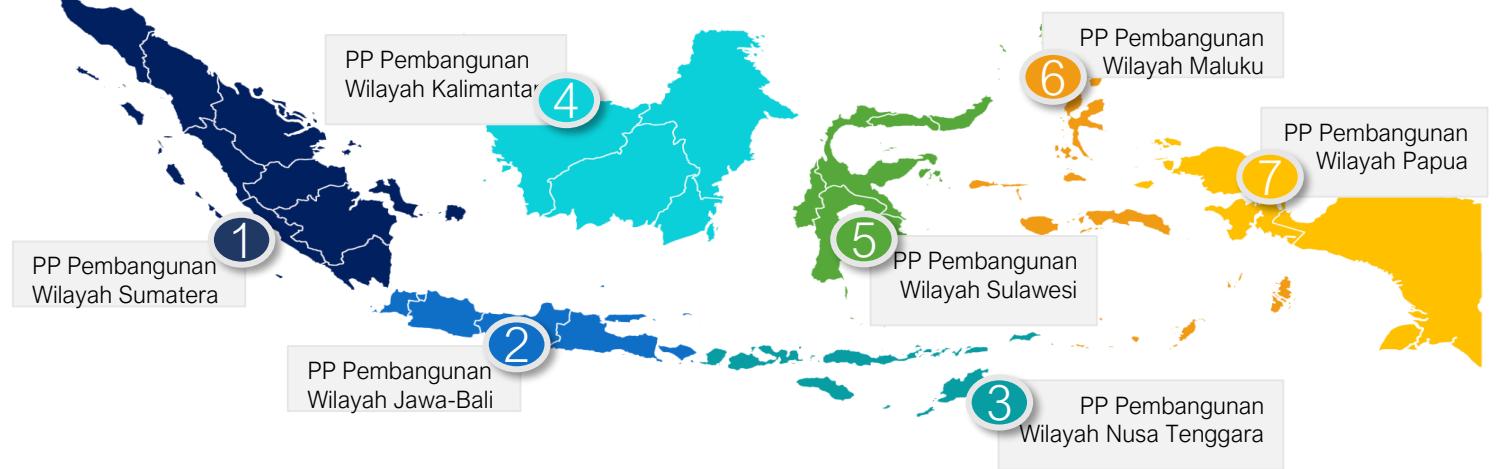
Strategi Pengembangan Wilayah

- > Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
- > Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

Indikator	Target 2021	Target 2022	Target RPJMN 2024
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	74,28%	82,85%	100%

Kerangka PN 2

“Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”



KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

- a. **Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.**
- b. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah.
- c. Penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi di daerah dampak pandemi Covid-19.
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi digital.
- e. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan untuk pemantapan pertumbuhan ekonomi, sistem kesehatan untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan stimulus pemulihan (recovery) ekonomi di daerah pasca dampak pandemi Covid-19.

Kerangka Pembahasan

Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan
tahun 2019 - 2021



ARAH KEBIJAKAN

1

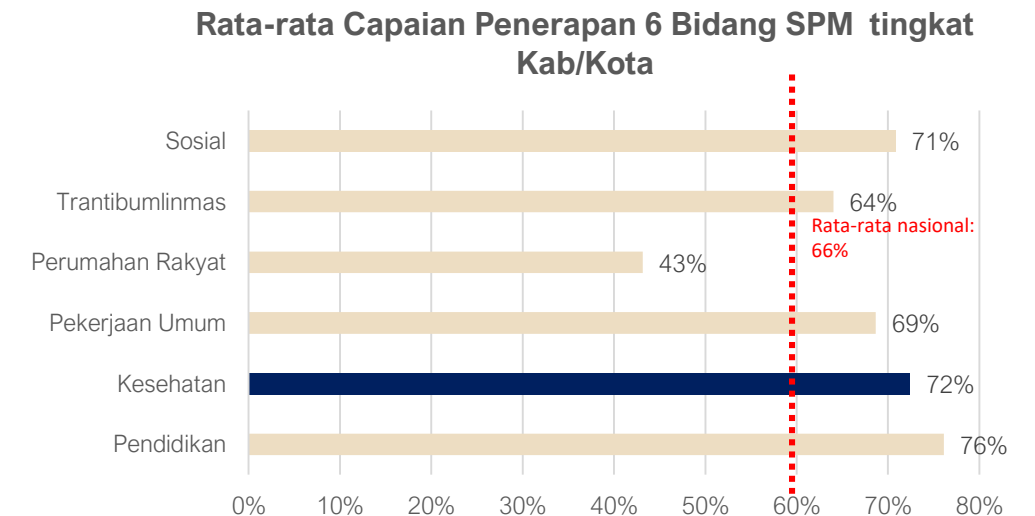
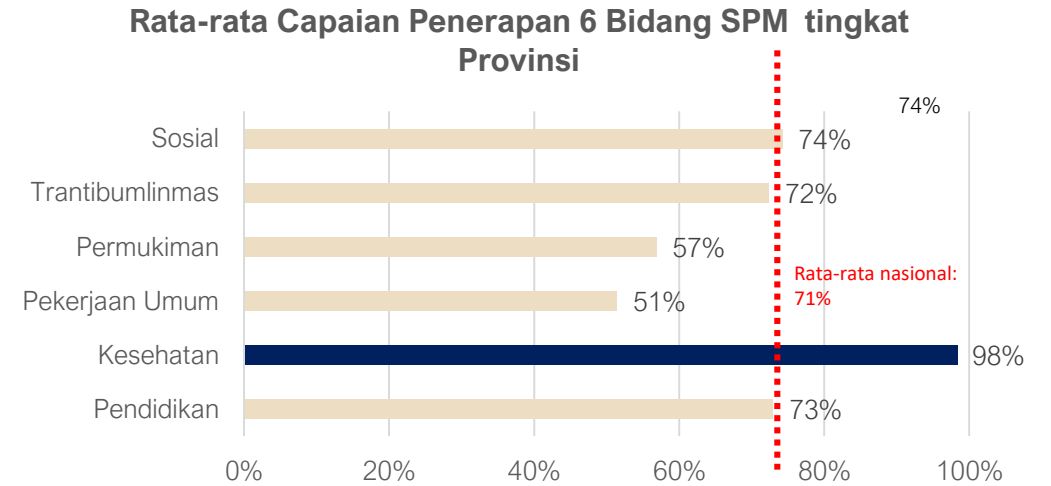
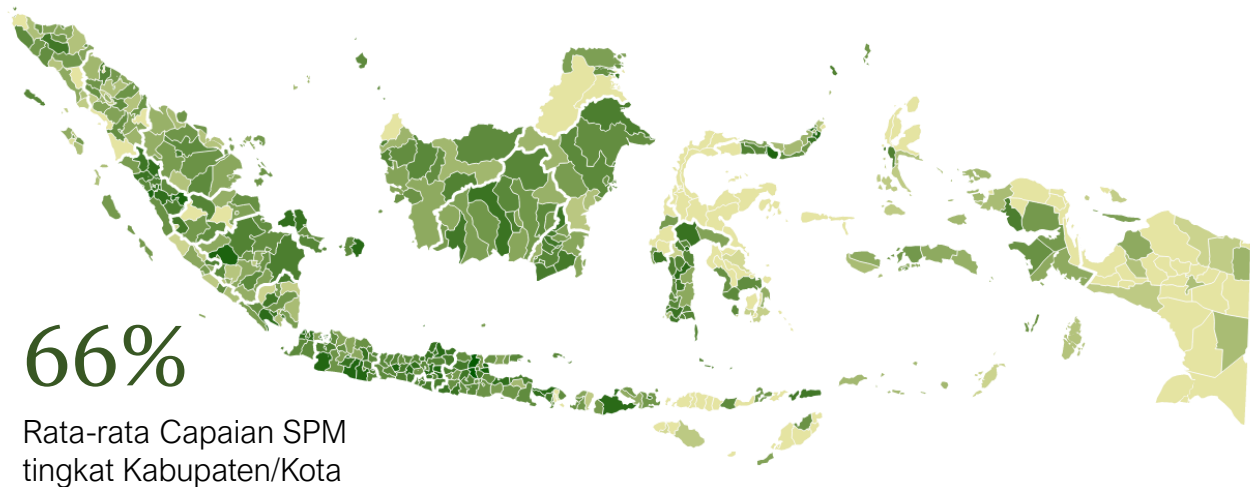
Arah Kebijakan Percepatan
Pelaksanaan SPM dalam RPJMN
2020 – 2024 dan RKP 2022

HASIL EVALUASI

2

Hasil Evaluasi Penerapan
SPM bidang Kesehatan tahun
2019 - 2021

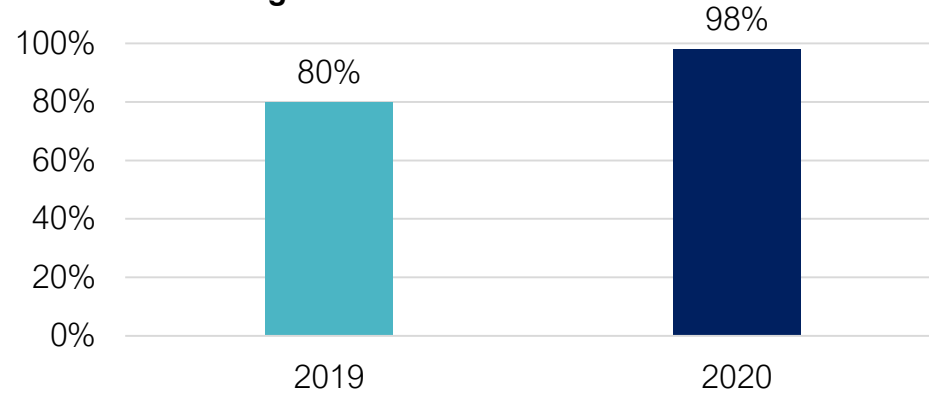
Rekapitulasi Capaian Penerapan SPM tahun 2020



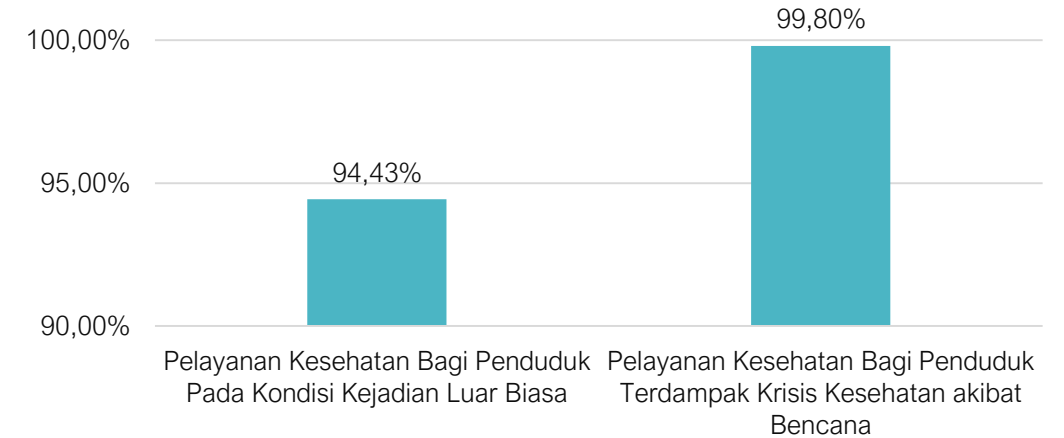
Rekapitulasi Capaian Penerapan SPM tahun 2020

Bidang Kesehatan tingkat Provinsi

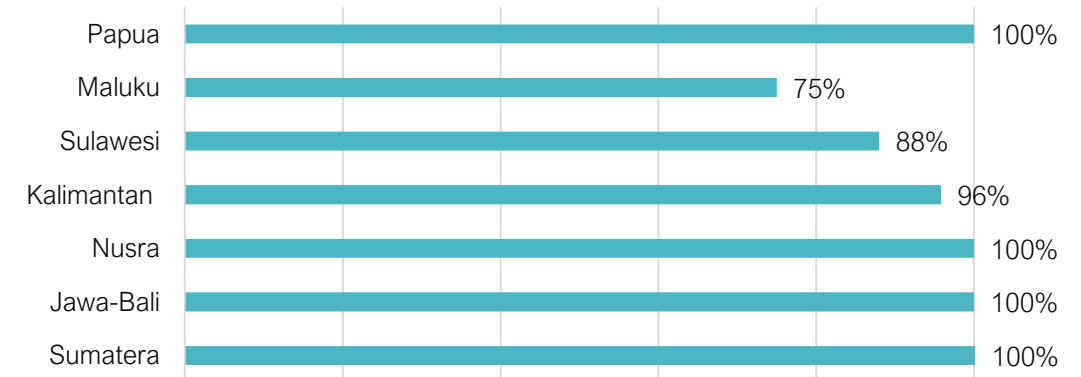
Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan tingkat Provinsi tahun 2019 - 2020



Capaian Indikator SPM bidang Kesehatan tingkat Provinsi tahun 2020



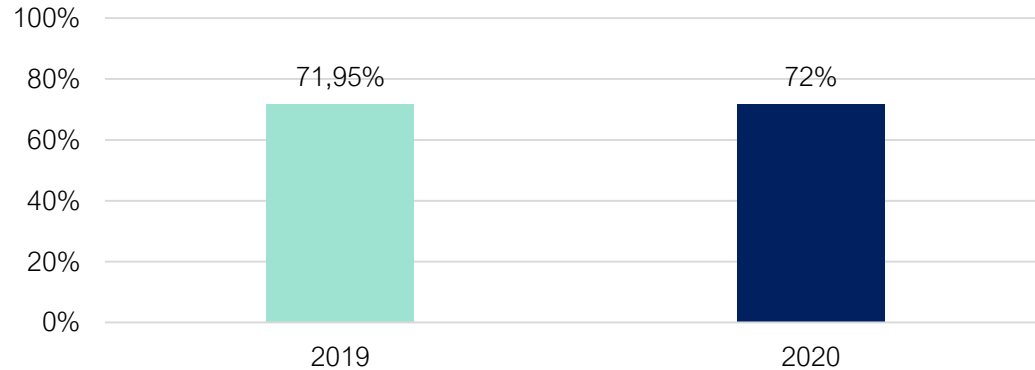
Capaian SPM Bidang Kesehatan tingkat Provinsi per Lingkup Wilayah tahun 2020



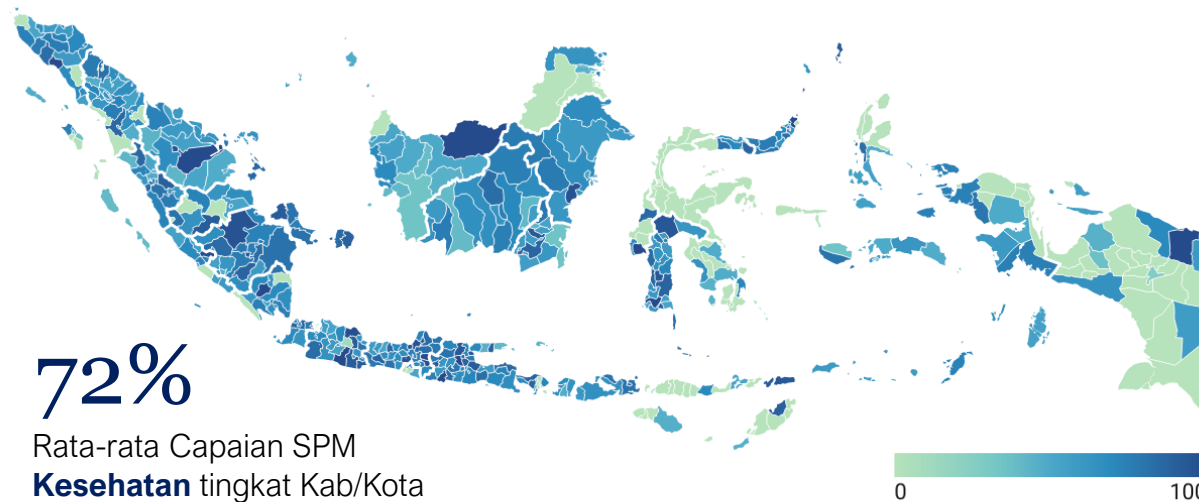
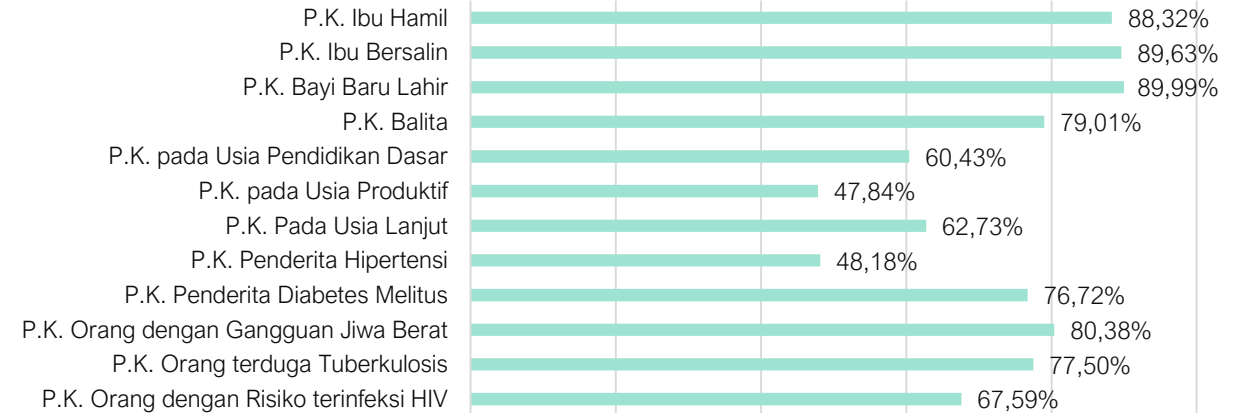
Rekapitulasi Capaian Penerapan SPM tahun 2020

Bidang Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota

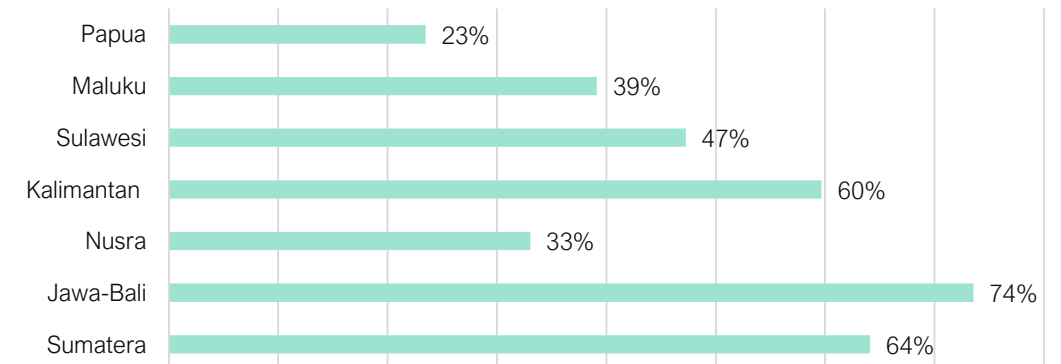
Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan tingkat Kab/Kota tahun 2019 - 2020



Capaian Indikator SPM bidang Kesehatan tingkat Kab/Kota tahun 2020

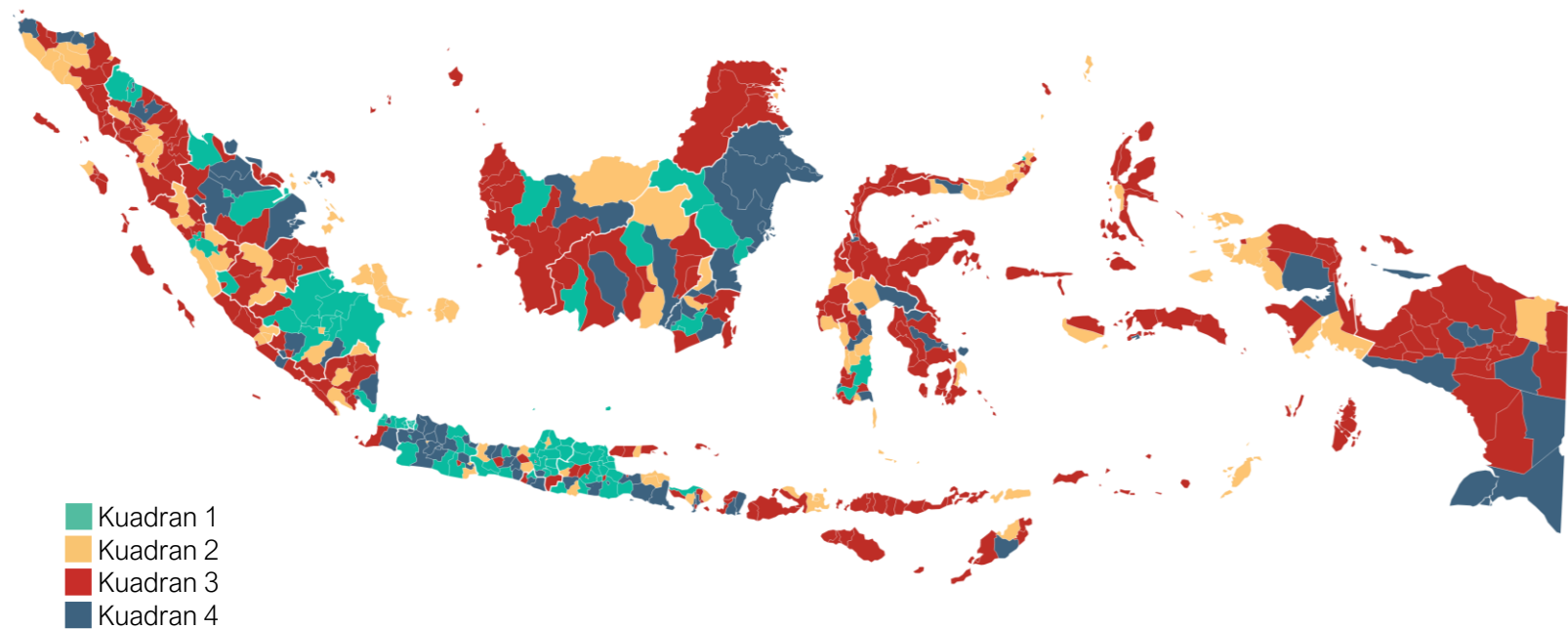


Capaian SPM Bidang Kesehatan tingkat Kab/Kota per Lingkup Wilayah tahun 2020



Skalogram Capaian SPM Kesehatan vs IKF tahun 2020

Kabupaten/Kota

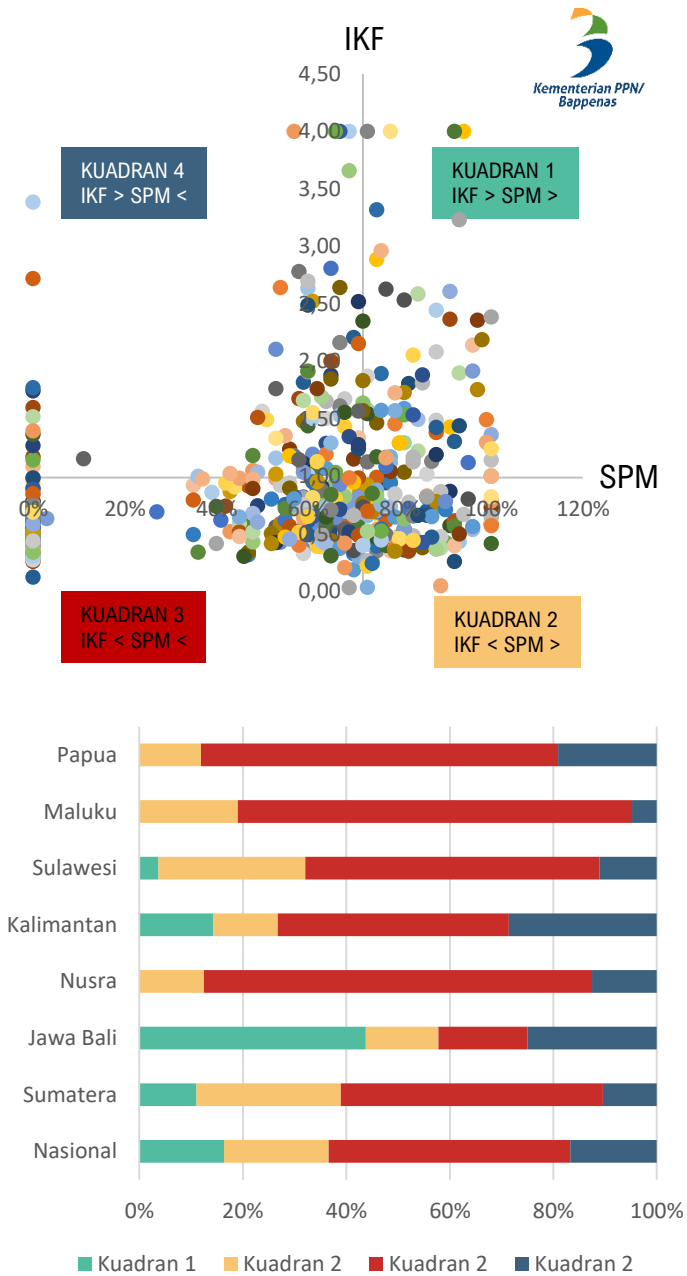


Terdapat 84 daerah di kuadran 1

Terdapat 104 daerah di kuadran 2

Terdapat 240 daerah di kuadran 3

Terdapat 86 daerah di kuadran 4



Kendala Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Hasil Evaluasi tahun 2020



Pengumpulan Data

- Pemerintah Daerah **kesulitan menentukan data sasaran** (data masih bersifat proyeksi) serta jenis krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi dan jenis bencana dan KLB



Penghitungan Kebutuhan

- Pemerintah daerah **belum memanfaatkan aplikasi Siscobikes** untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran



Perencanaan dan Penganggaran

- **Komitmen daerah** belum optimal terutama dari sisi anggaran
- **Koordinasi tim penerapan SPM kab/kota belum optimal**
- **Belum semua indikator SPM kesehatan mendapatkan prioritas** dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- **Refocusing anggaran** untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 menyebabkan kebutuhan operasional kurang dapat dipenuhi



Pelaksanaan

- **Kurangnya edukasi tentang indikator pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana** (baik petugas dan penduduk di daerah rawan bencana).
- **Belum bisa dipenuhinya sumber daya** termasuk tenaga kesehatan dan sarana & prasarana medis dan non medis sesuai standar di beberapa Puskesmas.
- **Masyarakat enggan dan khawatir untuk datang ke fasyankes** akibat pandemi Covid-19 sehingga penerapan indikator SPM Bidang Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan tatap muka sulit dilaksanakan
- **Pencatatan dan pelaporan data SPM belum tersistem dengan baik** (terhubung secara online dengan fasyankes) sehingga menyulitkan pemantauan capaian SPM secara *real time*
- Sistem pelaporan yang dikelola oleh Kemenkes **belum terintegrasi** dengan sistem yang dikelola oleh Kemendagri

Rekomendasi Strategi Percepatan Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Daerah



Pengumpulan Data

- Mengidentifikasi penerima layanan **by name by address**
- **Berkoordinasi erat dengan pihak terkait** yang memiliki data yang dibutuhkan (puskesmas, kecamatan, BPJS, dll)
- Inventarisasi ketersediaan sumber daya



Penghitungan Kebutuhan

- Mendorong **pemanfaatan aplikasi Siscobikes** oleh daerah melalui sosialisasi secara rutin



Penyusunan Rencana

- Memastikan pemenuhan SPM kesehatan sebagai **prioritas perencanaan daerah**
- **Menyusun rencana berbasis tipologi wilayah:** kapasitas daerah (SDM, fiskal, kelembagaan) dan prioritas pembangunan daerah (prioritisasi terhadap SPM)
- Memetakan dan merencanakan kapasitas dan **peran berbagai pihak** baik dari pemerintah maupun nonpemerintah → **Pentahelix Collaboration**
- Mencari **alternatif sumber pembiayaan** dan mengintegrasikannya dengan sumber pembiayaan APBN dan APBD
- Mengintegrasikan rencana SPM bidang kesehatan kedalam **dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah**



Pelaksanaan

- **Berkomitmen** dalam memberikan layanan dasar sesuai dengan rencana yang telah disusun
- Apabila anggaran terbatas, **penerima layanan difokuskan kepada penerima yang paling prioritas**
- Memanfaatkan **beberapa layanan SPM pada satu kegiatan**, seperti saat vaksinasi Covid-19, posyandu, pertemuan di tingkat desa, dsb
- Menyediakan **sistem transfer knowledge** sebagai solusi mutasi ASN
- **Mendorong efektivitas koordinasi Tim Sekber SPM** di daerah
- Menyusun pelaporan sesuai dengan **realita di lapangan**
- **Mengintegrasikan sistem pelaporan** Kemenkes dan Kemendagri
- Menginisiasi **survei kepuasan masyarakat**
- Melakukan **monitoring dan evaluasi secara berkala**
- Mendorong **pemberlakuan strategi insentif dan disinsentif fiskal**

Terima Kasih



(021) 390 5643
ext. 3316



dit.pd@bappenas.go.id



Menara Bappenas Lantai 8
Jln. HR. Rasuna Said Kav. B-1